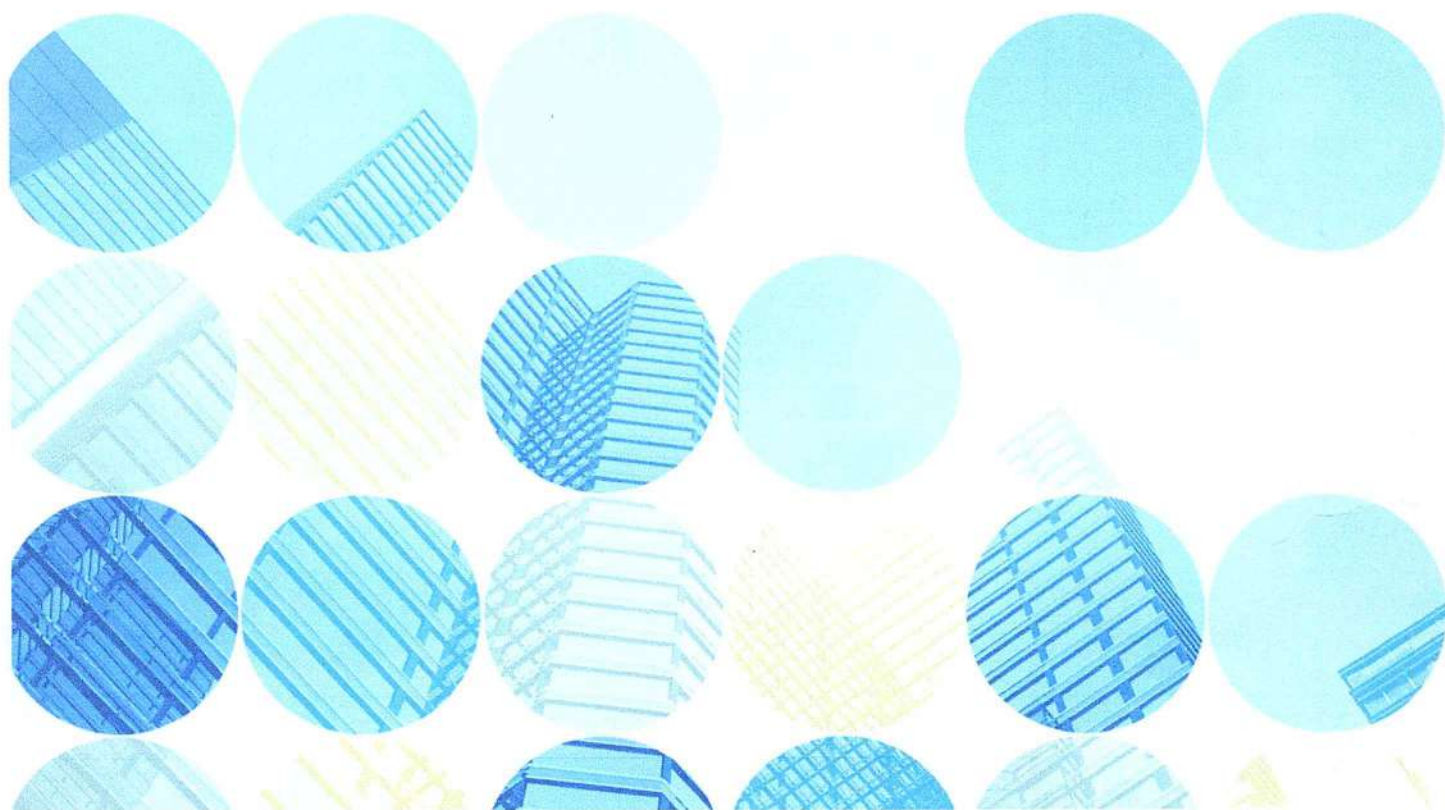




RENCANA KERJA (RENJA)

**BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA**

2026



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas berkat rahmat anugrah-Nya, Kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Pendapatan daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2026 .

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2026 akan dijadikan pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Tahun 2026 . Diharapkan Rencana Kerja ini dapat dijadikan sarana dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa yang akan datang oleh para pimpinan dan seluruh staf Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik di masa mendatang.

Dengan segala keterbatasan dalam penyusunan Rencana Kerja ini diharapkan kritik dan saran guna penyempurnaan Rencana Kerja ini. Semoga Rencana Kerja ini dapat bermanfaat bagi kemajuan pembangunan khususnya sector pendapatan Kabupaten Sumbawa.

Sumbawa Besar, 12 Januari 2025
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Sumbawa



AGUS MUSTAMIN, S.SOS, M.Si
NIP. 19700823 199211 1 001

DAFTAR ISI

H

al

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI.....	2
BAB I PENDAHULUAN.....	3
I.1 Latar Belakang.....	3
I.2 Landasan Hukum.....	6
I.3 Maksud dan Tujuan.....	8
I.4 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	10
II.1 Hasil Evaluasi Renja Bapenda Tahun 2024.....	10
II.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	18
II.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	23
II.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	30
II.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	33
BAB III TUJUAN DAN SASARAN BADAN PENDAPATAN DAERAH.....	35
III.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	35
III.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	36
III.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	40
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	43
BAB V PENUTUP.....	46

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dokumen Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Sebagai dokumen rencana tahunan perangkat Daerah, Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah mempunyai arti penting dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah mengingat Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Disamping itu Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah pada tahun sebelumnya.

Mengingat pentingnya dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi rancangan peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja (Renja) sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka pendek untuk jangka waktu satu tahun, yang disusun berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan bersifat indikatif.

Penyusunan Rancana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa tahun 2026 mengacu pada Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2026 dan Renstra Badan Pendapatan Daerah 2021-2026.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah , Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan perangkat daerah dengan rencana kerja pembangunan daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan **Rencana Kerja** Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan :

- a. Persiapan penyusunan Renja SKPD dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi ;
- b. Penyusunan rancangan awal Renja yang mencakup perumusan Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Pedoman pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana

program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada rancangan awal RKPD.

- c. Penyusunan rancangan
- d. Pelaksanaan forum perangkat daerah /lintas perangkat daerah bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam rancangan renja perangkat daerah.
- e. Perumusan rancangan akhir Renja PD merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja PD menjadi Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah.
- f. Penetapan.

Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2026 yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang akan datang, bertujuan menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran serta prakiraan maju tahun 2027, dan kesesuaian dengan dokumen perencanaan yaitu : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026. Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 dan Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) .

Dokumen Renja mempunyai arti yang sangat strategis dalam mendukung pelaksanaan program tahunan SKPD mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja merupakan acuan OPD untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2026;
2. Renja OPD merupakan salah satu instrument untuk mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan untuk mengetahui sejauh mana capaian

kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah pada tahun sebelumnya.

3. Rencana Kerja OPD merupakan penjabaran dari rencana jangka menengah yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pengelolaan anggaran pendapatan pengelolaan anggaran belanja, penatausahaan dan pelaporan pendapatan daerah, pada tahun-tahun sebelumnya, antisipasi atas permasalahan yang dihadapi, serta mengakomodasikan dan mempertimbangkan berbagai kebijakan nasional dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
4. Renja OPD disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan;
5. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam RPJMD pada tahun berkenaan;
6. Program dan kegiatan dalam Renja OPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum musrenbang;
7. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output).

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Badan Pendapatan daerah tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 68 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam wilayah daerah-daerah Tingkat I Bali, NTB dan NTT

2. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286;
4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2005 Tentang Pembangunan Daerah sebagaimana dijelaskan lagi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pembangunan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33)
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 114)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 Tahun 2019 tentang Kalsifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan Daerah.
14. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 44 Tahun 2019 tentang Program Strategis dan Unggulan Daerah dalam Pencapaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 31 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sumbawa 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2010 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 571);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 6 Tahun 2015 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 626
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor.2 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa;
18. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 2 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Sumbawa tahun 2016-2021(Lembaran Dearah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2021).
19. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa.
20. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2020 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud : Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2026 adalah :

1. Memberikan pedoman yang dapat mengarahkan seluruh potensi dalam rangka mewujudkan keterpaduan program dan kegiatan di tahun 2026
2. Mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai target pencapaian dalam tahun anggaran 2026; dan
3. Memberikan umpan balik sebuah proses perencanaan dalam rangka perencanaan tahun 2026.

Tujuan : Tujuan dari penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa tahun 2026 adalah:

1. Menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang akan dikerjakan dalam tahun anggaran 2026;
2. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas terhadap alokasi sumber daya dalam meningkatkan penerimaan pendapatan Asli daerah di tahun 2026 sesuai target sasaran strategis yang telah ditetapkan; dan
3. Mendorong dan menciptakan keterpaduan program dan kegiatan Badan Pendapatan daerah antar bidang khususnya dalam menggali sumber -sumber pendapatan daerah berdasarkan evaluasi kegiatan tahun sebelumnya.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa pada Tahun 2026 sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUSI PELAKSANAAN RENJA BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PENADAPATAN DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD

Sebelum dilaksanakan evaluasi, dilakukan pengukuran kinerja kemudian dilanjutkan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Analisis atas kendala atau permasalahan yang terjadi untuk dicarikan solusi dan pemecahannya sehingga tujuan dan target kegiatan dapat tercapai secara optimal sesuai dengan yang ditetapkan. Factor-faktor penyebab terpenuhi dan tidak terpenuhi target kinerja program atau kegiatan, implementasi yang timbul terhadap target capaian dan kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi factor-faktor penyebab, merupakan penjelasan dari capaian kinerja pada table 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Sumbawa

NO	INDIKATOR KINERJA (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT)	SPM/ Standar Nasional	IKK	TARGET RENSTRA SKPD					REALISASI CAPAIAN					PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12				
	A Peningkatan Nilai AKIP Bapenda			79,96	80,36	80,37	80,38	80,38	79,96	79,96	79,29	75,37				
1	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun.			11	12	12	12	12	12	12	12	12		12	12	
1	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2	2	2	2	2	2	2	2	2		2	2	
2	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	
3	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	
4	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	
5	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	
6	Jumlah laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi capaian kinerja SKPD			3	3	3	3	3	3	3	3	3		3	3	
7	Jumlah Laporan evaluasi kinerja perangkat daerah			3	3	3	3	3	3	3	3	3		3	3	
2	Jumlah Keluaran Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang direncanakan			16	16	16	16	16	16	16	16	16		16	16	
1	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN			55	55	55	55	55	55	55	55	55		55	55	
2	Jumlah dokumen hasil Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN			1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	
3	Jumlah dokumen penelausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD			1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	
4	Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD			1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	
5	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD			2	2	2	2	2	2	2	2	2		2	2	
6	Jumlah dokumen bahan tanggapan pemenuhan dan tindak lanjut pemenuhan			1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	
7	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD			8	8	8	8	8	8	8	8	8		8	8	
8	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran			1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	

[illegible]

[illegible]

Evaluasi pelaksanaan Renja Bapenda tahun lalu dan capaian Renstra Bapenda adalah mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja PD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target renstra PD berdasarkan Program dan Kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.

Adapun hasil dari evaluasi pelaksanaan Renja Bapenda tahun lalu dan capaian Renstra Bapenda adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bapenda	Kategori Predikat Hasil Evaluasi AKIP Bapenda	A	BB	93,77
2	Meningkatnya Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	69.479.876.571	77.227.240.134,81	111,15

Hasil perhitungan tersebut didapat dari pengukuran komponen-komponen Pendapatan Asli Daerah, Adapun komponen –komponen Pendapatan Asli Daerah terdiri dari :

- a. Pendapatan Pajak Daerah realisasi 110,63%;
- b. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan realisasi 100%;
- c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah realisasi 149,19%.

Dari target PAD Kabupaten Sumbawa Tahun 2024 sebesar Rp. 69.479.876.571 tercapai sebesar Rp. 77.227.240.134,81 atau 111,15% .

Dalam Pelaksanaan Rencana Kerja Bapenda tahun 2024 terdiri dari 2 Progran dan 9 Kegiatan dan 46 Sub Kegiatan, adapun yang menjadi prioritas program dan kegiatan pada Bapenda adalah sebagai berikut :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota , dengan 8 Kegiatandan 31 Sub Kegiatan;
- 2) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah , dengan 1 kegiatan dan 15 Sub Kegiatan;

Pengukuran capaian kinerja tahun 2024 dilakukan dengan membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024. Secara keseluruhan capaian realisasi Belanja Bapenda Kabupaten Sumbawa tahun 2024.

Renja 2024 berdasarkan program dan kegiatan DPA Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 9.280.320.781(Sembilan milyar dua ratus delapan puluh juta tiga ratus dua puluh ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah) dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 2.5
REALISASI PENDAPATAN DAERAH
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2024

KODE REKENING						URAIAN	TARGET MURNI	TARGET PERUBAHAN	REALISASI	%
						Rp	Rp		Rp	
1						2	3		6	7
4						PENDAPATAN	286.080.210.559,00	208.940.146.160,00	160.878.076.740,12	77,00
4	1					PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	97.755.880.389,00	126.129.609.632,00	77.227.240.132,12	61,23
4	1	1				Pendapatan Pajak Daerah	75.888.023.951,00	48.239.429.750,00	53.368.544.088,00	110,63
4	1	1	06			Pajak Hotel	2.612.925.000,00	2.912.925.000,00	3.799.742.868,00	130,44
4	1	1	06	01	0001	Pajak Hotel	2.513.700.000,00	2.813.700.000,00	3.659.612.868,00	130,06
4	1	1	06	03	0001	Pajak Losmen	99.225.000,00	99.225.000,00	140.130.000,00	141,22
4	1	1	07			Pajak Restoran dan Sejenisnya	4.006.800.000,00	4.200.000.000,00	6.566.439.484,00	156,34
4	1	1	07	01	0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	890.400.000,00	1.083.600.000,00	1.801.790.912,00	166,28
4	1	1	07	02	0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	3.116.400.000,00	3.116.400.000,00	4.764.648.572,00	152,89
4	1	1	08	02		Pajak Hiburan	77.175.000,00	400.000.000,00	1.046.856.324,00	261,71
4	1	1	08	02	0001	Pajak Pagelaran Kesenian /Musik/Tari/Busana	77.175.000,00	400.000.000,00	1.046.856.324,00	261,71
4	1	1	09	01		Pajak Reklame	1.320.060.000,00	1.320.060.000,00	1.246.778.666,00	94,45
4	1	1	09	01	0001	Pajak Reklame papan/Billboard/Videotron/Megatron	1.320.060.000,00	1.320.060.000,00	1.246.778.666,00	94,45
4	1	1	10	01		Pajak Penerangan jalan	16.939.737.201,00	19.100.000.000,00	21.557.637.123,00	112,87
4	1	1	10	01	0001	Pajak Penerangan Jalan dihasilkan sendiri			-	0,00
4	1	1	10	01	0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lainnya	16.939.737.201,00	19.100.000.000,00	21.557.637.123,00	112,87
4	1	1	11			Pajak Parkir	496.172.250,00	496.172.250,00	553.636.100,00	111,58
4	1	1	11		0001	Pajak Parkir	496.172.250,00	496.172.250,00	553.636.100,00	111,58
4	1	1	12	01		Pajak Air Tanah	384.772.500,00	384.772.500,00	442.041.951,00	114,88
4	1	1	12	01	0001	Pajak Air Tanah	384.772.500,00	384.772.500,00	442.041.951,00	114,88
4	1	1	13	01		Pajak Sarang Burung Walet	42.000.000,00	42.000.000,00	36.119.800,00	86,00
4	1	1	13	01	0001	Pajak Sarang Burung Walet	42.000.000,00	42.000.000,00	36.119.800,00	86,00
4	1	1	14			Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	35.853.382.000,00	4.672.500.000,00	1.274.273.653,00	27,27
4	1	1	14	23	0001	Pajak Pasir dan Kerikil	3.012.859.500,00	3.012.859.500,00	-	0,00
4	1	1	14	30	0001	Pajak Tanah Liat	375.716.250,00	375.716.250,00	-	0,00
4	1	1	14	37	0001	Pajak Minelar bukan logam dan batuan lainnya	32.464.806.250,00	1.283.924.250,00	1.274.273.653,00	99,25
4	1	1	15	01		Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	6.700.000.000,00	6.700.000.000,00	3.711.536.419,00	55,40
4	1	1	15	01	0001	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	6.700.000.000,00	6.700.000.000,00	3.711.536.419,00	55,40
4	1	1	16			Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	7.455.000.000,00	8.011.000.000,00	13.133.481.700,00	163,94
4	1	1	16	01	0001	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Pemindahan Hak	6.352.500.000,00	6.908.500.000,00	10.149.982.589,00	146,92
4	1	1	16	02	0001	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-Pemberian Hak Baru	1.102.500.000,00	1.102.500.000,00	2.983.499.111,00	270,61
4	1	03				Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	14.826.384.273,00	15.918.200.672,00	15.918.200.672,00	100,00
4	1	03	02			Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah(Deviden) atas penyertaan Modal pada BUMD	14.826.384.273,00	15.918.200.672,00	15.918.200.672,00	
4	1	03	02	01	0001	Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah(Deviden) atas penyertaan Modal pada BUMD	14.826.384.273,00	15.918.200.672,00	15.918.200.672,00	100,00
4	1	04				Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	7.041.472.165,00	61.971.979.210,00	7.940.495.372,12	12,81
4	1	04	04	01	0001	Hasil kereja sama Daerah		49.200.000,00	86.354.509,00	
4	1	04	05	01	0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	2.384.883.299,00	2.384.883.299,00	1.838.193.304,74	77,08
4	1	04	07	01	0001	Pendapatan Bunga	4.656.588.866,00	2.937.362.850,00	1.799.254.637,38	61,25
4	1	04	08	01	0001	Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah			3.868.442.506,00	
4	1	04	09	01	0001	Penerimaan konisi potongan, atau bentuk lain		56.600.533.061,00	53.450.399,00	
4	1	04	11	01	0001	Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan			87.545.396,00	
4	1	04	12	01	0001	Pendapatan denda pajak			126.969.580,00	
4	1	04	15	01	0001	Pendapatan dari pengembalian			80.285.040,00	
4	2					PENDAPATAN TRANSFER	188.324.330.170,00	82.810.536.528,00	83.650.836.608,00	101,01
4	2	02				Pendapatan Transfer Antar Daerah	188.324.330.170,00	82.810.536.528,00	83.650.836.608,00	101,01
4	2	02	01			Pendapatan Bagi Hasil Pajak	188.324.330.170,00	82.810.536.528,00	83.650.836.608,00	101,01
4	2	02	01	01	0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	30.222.010.124,00	13.370.344.748,10	12.577.012.075,00	94,07
4	2	02	01	01	0002	Pendapatan Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	26.992.078.150,00	10.634.723.526,00	11.982.995.618,00	112,68
4	2	02	01	01	0003	Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)	61.092.495.536,00	28.765.407.214,80	29.653.408.023,00	103,09

4	2	02	01	01	0004	Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Air Permukaan	115.303.400,00	48.632.841,90	50.327.253,00	103,48
4	2	02	01	01	0005	Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Rokok	69.902.442.960,00	29.991.428.197,20	29.387.093.639,00	97,98

REALISASI KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

BADAN

: BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

KODE DAN NAMA URUSAN

: 4.04

KODE DAN UNIT ORGANISASI

: 4.04.03.01

KODE REKENING	URAIAN	OUTCOME		OUTPUT	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	2	3	5		6
4.04.03.01	BADAN PENDAPATAN DAERAH	10.159.328.850,00	9.280.320.781,00	A	BB
5.02.01	Program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.285.832.425,00	8.447.532.331,00	80,38	75
5 02 01 2.01	Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	55.592.580,00	54.802.480,00	12	12
5 02 01 2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.079.100,00	9.004.000,00	2	2
5 02 01 2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	5.964.780,00	5.882.780,00	1	1
5 02 01 2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA SKPD	4.809.600,00	4.762.000,00	1	1
5 02 01 2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	6.444.400,00	6.395.900,00	1	1
5 02 01 2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	3.628.900,00	3.604.500,00	1	1
5 02 01 2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.733.000,00	6.674.500,00	3	3
5 02 01 2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.932.800,00	18.478.800,00	3	3
5 02 01 2 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.744.605.470,00	7.053.041.312,00	16	16
5 02 01 2 02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.721.374.970,00	7.030.076.312,00	55	55
5 02 01 2 02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3.772.000,00	3.712.500,00	1	1
5 02 01 2 02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	4.019.000,00	3.978.000,00	1	1
5 02 01 2 02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3.056.500,00	3.024.000,00	1	1
5 02 01 2 02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.613.000,00	3.581.500,00	2	2
5 02 01 2 02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2.035.000,00	2.010.000,00	1	1
5 02 01 2 02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	2.944.000,00	2.925.000,00	8	8
5 02 01 2 02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3.791.000,00	3.734.000,00	1	1
5 02 01 2 03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4.104.500,00	3.858.000,00	4	4
5 02 01 2 03 01	Penyusunan Perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3.005.000,00	2.971.000,00	1	1
5 02 01 2 03 05 03	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah SKPD	1.099.500,00	887.000,00	2	2
5 02 01 2 04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	31.746.000,00	31.602.000,00	12	12
5 02 01 2 04 07	Pelaporan pengelolaan retribusi daerah	31.746.000,00	31.602.000,00	12	12
5 02 01 2 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3.019.400,00	2.981.400,00	7	7
5 02 01 2 05 03	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	1.900.000,00	1.870.000,00	7	7
5 02 01 2 05 05	Monitoring, Evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	1.119.400,00	1.111.400,00	1	1
5 02 01 2 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	619.461.075,00	584.408.494,00	82	82
5 02 01 2 06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.542.875,00	4.304.000,00	1	1
5 02 01 2 06 02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	99.820.000,00	96.720.000,00	2	2
5 02 01 2 06 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	49.437.000,00	20.169.500,00	32	32
5 02 01 2 06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	463.518.000,00	461.834.994,00	36	36
5 02 01 2 06 10	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	2.143.200,00	1.380.000,00	3	3
5 02 01 2 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	593.716.000,00	540.259.234,00	53	53
5 02 01 2 08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.570.000,00	12.263.500,00	6	6
5 02 01 2 08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	74.600.000,00	57.911.544,00	4	4
5 02 01 2 08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.605.000,00	35.244.190,00	35	35
5 02 01 2 08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	470.940.000,00	434.840.000,00	8	8
5 02 01 2 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	233.588.400,00	208.181.411,00	31	31

5 02 01 2 09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	183.588.450,00	158.205.661,00	30	30
5 02 01 2 09 10	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	49.999.950,00	49.975.750,00	1	1
5 02 04	Program pengelolaan Pendapatan daerah	873.496.425,00	832.788.450,00		
5 02 04 2 01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan daerah	873.496.425,00	832.788.450,00	28	28
5 02 04 2 01 01	Perencanaan Pengelolaan Pajak daerah	13.950.000,00	7.822.000,00	2	2
5 02 04 2 01 02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	244.609.600,00	238.564.200,00	5	5
5 02 04 2 01 03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	94.142.300,00	86.613.750,00	6	6
5 02 04 2 01 04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	84.391.025,00	82.496.900,00	5	5
5 02 04 2 01 05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak daerah	83.188.000,00	81.530.000,00	12	12
5 02 04 2 01 06	Pengelolaan Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak daerah	18.456.000,00	16.167.200,00	2	2
5 02 04 2 01 07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	39.118.500,00	38.553.000,00	241353	241353
5 02 04 2 01 08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	73.688.000,00	72.239.000,00	9	9
5 02 04 2 01 09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	22.060.000,00	21.607.000,00	121	121
5 02 04 2 01 10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak daerah	20.266.900,00	15.002.500,00	12	12
5 02 04 2 01 11	Penagihan Pajak Daerah	115.421.000,00	114.416.500,00	2	2
5 02 04 2 01 12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	14.528.100,00	13.827.000,00	25	25
5 02 04 2 01 13	Pengendalian , Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	34.239.000,00	32.510.500,00	2	2
5 02 04 2 01 14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak daerah dan Retribusi Daerah	15.438.000,00	9.439.900,00	4	4
5 02 04 2 01 15	Elektronifikasi transaksi pemerintah daerah	0,00	-	1	0

Program tersebut diatas merupakan program utama dan program pendukung pada Bapenda Kabupaten Sumbawa dalam rangka memungut PAD dimana salah satu tolak ukur kinerjanya adalah realisasi penerimaan PAD.

Untuk itu berdasarkan capaian kinerja pada Tahun 2024, maka dapat ditentukan langkah korektif yang menjadi kebijakan dalam perencanaan tahun berikutnya, antara lain sebagai berikut :

1. Perhitungan dan perumusan target Pendapatan Asli Daerah tahun 2025 memperhatikan realisasi penerimaan tahun 2024 yang disesuaikan dengan prediksi pertumbuhan objek pajak daerah dan asumsi lainnya yang relevan;
2. Pemetaan kebutuhan belanja langsung dihitung lebih cermat dengan prioritas belanja diarahkan pada pemenuhan kebutuhan operasional penyelenggaraan pelayanan, revitalisasi sarana dan prasarana pelayanan.

Pelaksanaan Renja Badan Pendapatan Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra dapat disajikan dalam Tabel T-C.29. Sebagian besar program/ kegiatan telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan yakni realisasi sebesar 100 persen. Dapat pula dievaluasi bahwa tidak ada program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Penjelasan lebih terperinci dalam tabel T-C.29 :

Indikator dan Target Reformasi Operasi yang mengandung poin-poin mautnya HKPD

[illegible]

No	Kategori	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output/Hasil/Outcome/Target/Indikator)	Target Kinerja Utama pada Tahun 2021-2022 (Sasaran Kinerja Pegawai)		Realisasi (Capaian Kinerja) pada Tahun 2021-2022 (Sasaran Kinerja Pegawai)		Target Kinerja Utama dan Anggaran Kinerja 2021-2022 (Sasaran Kinerja Pegawai)				Realisasi (Capaian Kinerja) dan Anggaran Kinerja 2021-2022 (Sasaran Kinerja Pegawai)				Target Capaian Kinerja dan Anggaran Kinerja 2021-2022 (Sasaran Kinerja Pegawai)				Realisasi (Capaian Kinerja) dan Anggaran Kinerja 2021-2022 (Sasaran Kinerja Pegawai)				Target Capaian Kinerja dan Anggaran Kinerja 2021-2022 (Sasaran Kinerja Pegawai)			
				I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	Meningkatkan Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang dilaksanakan	100	554.963.822	72	301.320.340	80	457.518.000,00	9	73.943.224	-	28.392.809	10	173.336.836	19.413.654	153.923.182	100,00	621.488.444,88	80,00	146,03	146,03	146,03	146,03	146,03	146,03	
Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD		Jumlah dokumen arsip dinamis yang diarsipkan	15	9.300.120	6	4.100.000,00	3	2.143.300,00	3	-	-	-	-	3	3.300.000	9	694.577,80	9,00	5.079.276,68	80,00	24,13	24,13	24,13	24,13	24,13	24,13	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah dokumen Penyediaan Urusan Pemerintahan Daerah yang diberikan	265	2.764.166.443	159	1.361.831.637,00	83	983.788.509	37	93.979.000	9	148.318.732	13	137.818.644	14	942.318.634	13,00	344.239.234	13,00	87,19	87,19	87,19	87,19	87,19	87,19	87,19	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat (manuskrip/korur)		Jumlah Surat (manuskrip/korur)	30	62.501,00	18	33.200.812	6	12.570.000,00	6	-	-	-	-	6	1.793,80	6	10.548.800	6	12.360.500	6	75,17	75,17	75,17	75,17	75,17	75,17	75,17
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Rasio Rasio Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	50	578.708.561	17	344.744.813	8	74.600.000,00	3	-	-	28.441.733	-	15.581.878	2	57.913.545	4	44.334.363,34	14,00	81,69	81,69	81,69	81,69	81,69	81,69	81,69	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perangkapan Kantor		Jumlah Peralatan dan Perangkapan Kantor yang diberikan	179	262.260.000	108	162.409.000	85	36.655.000,00	8	4.200.000	7	4.200.000	12	13.849,95	30	15.244.700	31	34.897.854,34	14,00	81,69	81,69	81,69	81,69	81,69	81,69	81,69	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah pelayanan Umum Kantor yang dilaksanakan	40	7.803.444,429	24	619.474.000	6	470.540.000,00	2	91.105.400	2	111.382.000	3	110.325.000	2	121.775.000	6	434.840.000	3	406.307.352,70	32,00	76,88	76,88	76,88	76,88	76,88	76,88
Penelitian dan Pengembangan Riset Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Riset dan Pengembangan Riset yang dilaksanakan	140	1.043.207.289	243	879.872.889,00	81	233.848.400	4	0	6	28.687.300	3	18.712,10	18	143.631.741	21	208.181.611	21	249.577.454,97	172,00	76,08	76,08	76,08	76,08	76,08	76,08
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan Pemeliharaan dan pembayaran Pajak	80	603.340.800	48	454.277.289	16	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,00	454.277.289,00	80,00	82,24	82,24	82,24	82,24	82,24	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan Pemeliharaan dan pembayaran Pajak	150	408.066.359	90	38.435.000	80	183.288.450,00	4	-	-	21.652.300	5	39.718,30	13	95.314.891	30	15.205.643	90	314.329.275,64	120,00	40,84	40,84	40,84	40,84	40,84	40,84
Meningkatkan Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Meningkatkan Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Penelitian dan Pengembangan Riset Daerah	Jumlah Riset dan Pengembangan Riset yang dilaksanakan	5	110.810.000	8	62.240.000	1	49.997.980,00	-	-	-	-	1	49.975.750	3	49.941.363,71	4,00	132.191.563,70	80,00	104,15	104,15	104,15	104,15	104,15	104,15	
		Penelitian dan Pengembangan Riset Daerah	Jumlah Riset dan Pengembangan Riset yang dilaksanakan	40	2.714.748.354	8.800.408.906	305.915.341.790	1.791.390.658	178.948.164.843	879.498.6128	88091	17.810.000	88091	82.449.300	88091	159.418.859	88091	874.110.400	88091	832.708.460	88091	159.418.859	88091	32,07	32,07	32,07	32,07
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1. Persentase Capaian Kinerja pendataan, pendaftaran dan penetapan OP/SP/WP Wajib Pajak	600	2.834.724.044	300	1.131.617.700	100	294.841.633	25	84.900,00	23	16.778.200	21	35.848.000	21	222.218.900	300	252.848.100	180	182.345.437	400,00	90,34	90,34	90,34	90,34	90,34
		2. Jumlah Realisasi Pajak Daerah	Jumlah Realisasi Pajak Daerah	111.470.444.334	1.387.313.331	254.664.713.788	1.499.829.304,00	42.080.124,00	319.290.400	88021	4.100.000	88021	27.700.000	88021	34.646.700	88021	177.333.000	88021	264.873.700	88021	218.021.315,58	88021	1.499.829.304,00	88021	300,32	300,32	
		3. Persentase Capaian Kinerja Pembinaan dan Pengawasan Objek Retribusi daerah, Pajak Daerah dan transfer antar daerah	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Objek Retribusi daerah, Pajak Daerah dan transfer antar daerah	600	2.331.331.800	300	778.444.837,00	900	294.284.600	13	5.360.800	13	7.755.000	15	46.125,18	25	196.343.300	100	278.850.800	200	249.334.316,93	400,00	1.005.953.731,81	80,00	24,61	24,61	24,61
		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah dokumen pendataan, pendaftaran dan penetapan PAD	340	2.834.724.044	64	618.019.717,00	13	334.841.633	9	8.318.000	9	26.738.200	2	39.648.000	7	227.218.900	13	292.996.100	26	217.343.463,71	112,00	900.493.321,70	80,00	30,66	30,66	30,66
			Jumlah Dokumen Pembinaan, Pemantauan dan Penagihan PAD	700	1.827.262.331	469	1.401.829.364,00	150	290.290.400	39	4.170.000	39	68.800,00	20	64.848.700	33	187.280.000	110	294.973.700	194	254.821.315,50	624,00	1.499.829.304,00	80,00	100,13	100,13	100,13
			Jumlah Dokumen analisis kebijakan pengelolaan PAD dan transfer antar Daerah	115	1.331.331.800	69	778.444.837,00	28	294.284.600	1	6.360.000	1	2.778.000	2	86.128.100	19	196.348.300	23	278.850.800	23	249.334.316,93	92,00	1.005.953.731,81	80,00	44,01	44,01	44,01
		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak daerah	Jumlah Wajib Pajak yang terdampak dari kebijakan pajak daerah	10	74.174.532	3	42.823.400	3	19.990.000,00	3	-	-	3.700.000	3	3.150.000	3	3.437.000	5	7.882.000	2	6.315.007,17	3,00	47.008.880,13	380,00	43,94	43,94	43,94
		Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak daerah	Jumlah Dokumen Analisis dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak daerah	25	1.068.448.140	2	365.100.972	8	84.371.025,00	-	-	-	-	2	46.947.300	2	184.255.700	5	318.584.300	5	281.844.38.634	8,00	1.499.829.304,00	80,00	89,80	89,80	89,80
Meningkatkan Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Meningkatkan Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak daerah	Jumlah Wajib Pajak yang terdampak dari kebijakan pajak daerah	10	800.158.304	18	333.098.000	6	94.312.300,00	-	-	-	-	6	31.913,20	6	41.712.200	6	81.613.700	6	19.887.212,97	24,00	423.623.264,90	80,00	60,99	60,99	60,99
		Penyediaan sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak daerah	25	1.068.448.140	2	365.100.972	8	84.371.025,00	-	-	-	-	5	82.995.800	5	62.964.300	5	62.964.300	8,00	84.371.025,00	80,00	61,99	61,99	61,99	61,99	
		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Objek Pajak	60	496.953.000	28	304.979.700	32	183.888.000,00	3	6.330.000	3	9.000.000	3	18.448.000	3	47.793.800	12	91.530.000	12	79.909.345,20	48,00	384.815.733,81	80,00	70,13	70,13	70,13
		Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Aplikasi	10	124.841.590	6	70.503.100	2	16.456.000,00	1	-	1	2.129.300	2	36.387.300	2	17.642.818,15	2	36.387.300	2	17.642.818,15	6,00	82.476.094,11	80,00	70,98	70,98	70,98
		Pertanian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.206.969	300.550.220	714.209	236.103.800	243.200	35.118.900,00	80.338	-	-	-	-	243.352	48.032.000	243.352	37.982.474,91	943.124,00	274.688.972,00	943,124	274.688.972,00	943,124	274,97	274,97	274,97	
		Pertanian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	46	879.000.830	27	879.000.830	9	72.688.000,00	1	-	3	15.300.000	2	1.800.000	3	54.958.000	9	36.818.803,12	16,00	798.794.388,13	80,00	81,66	81,66	81,66	81,66	
		Pertanian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	606	182.550.850	280	107.683.200	321	22.040.000,00	-	171	-	-	2	2.897.000	121	21.607.000	131	21.607.000	484,00	118.846.612,31	80,00	70,66	70,66	70,66	70,66	
		Pertanian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	46	879.000.830	27	879.000.830	9	72.688.000,00	1	-	3	15.300.000	2	1.800.000	3	54.958.000	9	36.818.803,12	16,00	798.794.388,13	80,00	81,66	81,66	81,66	81,66	
		Pertanian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	606	182.550.850	280	107.683.200	321	22.040.000,00	-	171	-	-	2	2.897.000	121	21.607.000	131	21.607.000	484,00	118.846.612,31	80,00	70,66	70,66	70,66	70,66	
		Pertanian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	46	879.000.830	27	879.000.830	9	72.688.000,00	1	-	3	15.300.000	2	1.800.000	3	54.958.000	9	36.818.803,12	16,00	798.794.388,13	80,00	81,66	81,66	81,66	81,66	

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa telah menyusun Indikator Kinerja Utama untuk tahun 2025. Sesuai Renstran Bapenda Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 – 2026 . Dalam rangka untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati dan wakil Bupati Sumbawa. Maka Bapenda Kabupaten Sumbawa menjabarkannya dalam bentuk program dan kegiatan.

Kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kebijakan, program dan kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan dan arah kebijakan organisasi yang tertuang dalam Strategic planning suatu organisasi. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada Tujuan atau target, kinerja organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolak ukurnya. Sedangkan pengukuran kinerja adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa, hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan dan efektifitas Tindakan dalam mencapai tujuan.

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. IKU terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis , sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Bapenda Kabupaten Sumbawa.

Mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Sumbawa yang dijadikan acuan serta telah dianalisis dan dikaji secara komprehensif,

maka Bapenda Kabupaten Sumbawa dalam upaya untuk meningkatkan profesionalisme, akuntabilitas, dan kredibilitas terus akan dilakukan agar lebih mampu dan terpercaya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang perpajakan daerah di kabupaten Sumbawa, selain itu juga Bapenda Kabupaten Sumbawa merumuskan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai selama tahun 2021 – 2026 dan merumuskan pula IKU Bapenda Kabupaten Sumbawa untuk merealisasikannya yaitu :

Tujuan :

Meningkatnya Kinerja pengelolaan pendapatan asli daerah dengan peningkatan kualitas reformasi birokrasi.

Sasaran :

1. Mengkatnya Jumlah Pendapatan Asli Daerah
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bapenda

Induikator Kinerja Utama :

1. Jumlah Pendapatan Asli Daerah
2. Kategori Nilai AKIP

Dengasn adanya perkembangan dibidang teknologi informasi maka diharapkan ketersediaan dan keakuratan data yang dihasilkan atau disajikan dapat digunakan sebagai bahan untuk pengambilan keputusan dalam rangka peningkatan kualitas pengeloplaan pendapatan daerah melalui pemungutan pajak daerah. Adapun secara rinci pencapaian kinerja Bapenda Kabupaten Sumbawa Tahun 2025 table 2.4 sebagai berikut:

Tabel 2.4
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2026
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja(Outcome)	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
UNSUR PENUNJANG UEUSAN PEMERINTAH						UNSUR PENUNJANG UEUSAN PEMERINTAH					
KEUANGAN					14.232.999.612	KEUANGAN				14.232.999.612	
A	Program Penunjang Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa		Peningkatan Nilai AKIP Bapenda	80,38%	12.392.063.372	Program Penunjang Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa	Bapenda	Peningkatan Nilai AKIP Bapenda	80,38%	12.392.603.486	
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun.	12 Dokumen	120.421.950	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bapenda	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun.	12 Dokumen	120.421.950	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bapenda	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	10.985.590	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bapenda	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	10.985.590	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Bapenda	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	7.622.450	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Bapenda	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	7.622.450	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Bapenda	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	6.268.900	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Bapenda	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	6.268.900	
4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Bapenda	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	9.386.410	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Bapenda	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	9.386.410	
5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Bapenda	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	4.393.400	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Bapenda	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	4.393.400	

6	Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bapenda	jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi capaian kinerja SKPD	3 Laporan	32.310.300	Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bapenda	jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi capaian kinerja SKPD	3 Laporan	32.310.300
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bapenda	Jumlah Laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	3 Laporan	49.454.900	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bapenda	jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	3 Laporan	49.454.900
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Keluaran Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang direncanakan	16 Dokumen	10.736.724.775	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Keluaran Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang direncanakan	16 Dokumen	10.736.724.775
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bapenda	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	55 org/bln	10.696.520.875	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bapenda	jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan	55 org/bln	10.696.520.875
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Bapenda	Jumlah dokumen hasil Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	1 Dokumen	5.846.500	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Bapenda	jumlah dokumen hasil Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	1 Dokumen	5.846.500
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bapenda	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	1 Dokumen	15.636.500	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bapenda	jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	1 Dokumen	15.636.500
4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Bapenda	Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	1 Dokumen	3.698.200	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Bapenda	jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	1 Dokumen	3.698.200
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Bapenda	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Dokumen	4.371.400	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Bapenda	jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Dokumen	4.371.400
6	Pengelolaan dan Penyajian bahan Tanggapan Pemeriksaan	Bapenda	Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan	2 Dokumen	2.461.800	Pengelolaan dan Penyajian bahan Tanggapan Pemeriksaan	Bapenda	jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan	2 Dokumen	2.461.800
7	Koordinasi dan penyajian Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Bapenda	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	8 Laporan	3.601.500	Koordinasi dan penyajian Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Bapenda	jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	8 Laporan	3.601.500
8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Bapenda	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	1 Dokumen	4.587.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Bapenda	jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	1 Dokumen	4.587.000
3	Administrasi Barang Milik Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang di Susun	4 Dokumen	5.974.254	Administrasi Barang Milik Daerah		jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang di Susun	4 Dokumen	5.974.254

1	Penyusunan Perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	Bapenda	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD	1 Dokumen	3.771.240	Penyusunan Perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	Bapenda	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD	1 Dokumen	4.148.364
2	Rekonsiliasi Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Bapenda	Jumlah laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 laporan	1.659.900	Rekonsiliasi Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Bapenda	Jumlah laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 laporan	1.825.890
4	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat daerah		Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi daerah	12 Laporan	27.426.000	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat daerah		Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi daerah	12 Laporan	33.275.000
	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah		Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi daerah	12 Laporan	33.275.000	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah		Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi daerah	12 Laporan	33.275.000
5	Administrasi kepegawaian perangkat daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disusun	7 Dokumen	5.898.200	Administrasi kepegawaian perangkat daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disusun	7 Dokumen	5.898.200
2	pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian	Bapenda	Jumlah dokumen pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian	7 Dokumen	3.973.200	pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian	Bapenda	Jumlah dokumen pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian	7 Dokumen	3.973.200
	monitoring, evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Bapenda	Jumlah Dokumen monitoring, evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1.925.000	monitoring, evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Bapenda	Jumlah Dokumen monitoring, evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1.925.000
6	Administrasi Umum dan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disusun	82 Dokumen	531.574.533	Administrasi Umum dan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disusun	82 Dokumen	531.574.533
1	Penyediaan komponen instalasi listrik /Penerangan bangunan kantor	Bapenda	Jumlah paket komponen Instalasi listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	6.048.763	Penyediaan komponen instalasi listrik /Penerangan bangunan kantor	Bapenda	Jumlah paket komponen instalasi listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	6.048.763
2	Penyediaan peralatan dan peralatan kantor	Bapenda	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	10 paket	265.198.670	Penyediaan peralatan dan peralatan kantor	Bapenda	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	10 paket	265.198.670
3	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bapenda	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	32 Kali	39.986.100	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bapenda	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	32 Kali	39.986.100
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bapenda	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	217.343.500	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bapenda	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	217.343.500
5	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Bapenda	Jumlah Dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	3 Dokumen	2.997.500	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Bapenda	Jumlah Dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	3 Dokumen	2.997.500
7	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Dokumen Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disusun	53 Dokumen	778.646.000	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Dokumen Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disusun	53 Dokumen	778.646.000
1	Penyediaan jasa Surat Menyurat	Bapenda	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	6 Laporan	15.210.800	Penyediaan jasa Surat Menyurat	Bapenda	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	6 Laporan	15.210.800

2	Penyediaan jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Bapenda	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	4 Laporan	81.554.000	Penyediaan jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Bapenda	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	4 Laporan	81.554.000	
3	Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bapenda	Jumlah laporan penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	35 Laporan	57.079.000	Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bapenda	Jumlah laporan penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	35 Laporan	57.079.000	
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bapenda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	8 Laporan	624.802.200	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bapenda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	8 Laporan	624.802.200	
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	47 Unit	213.366.775	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	47 Unit	213.366.775	
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	30 Unit	163.366.775	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	30 Unit	163.366.775	Sub Keg baru
4	Pemeliharaan /Rehabilitasi sarana dan Prasarana gedung kantor atau bangunan Lainnya	Bapenda	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan Lainnya yang dipelihara / di rehabilitasi	1 Unit	50.000.000	Pemeliharaan /Rehabilitasi sarana dan Prasarana gedung kantor atau bangunan Lainnya	Bapenda	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan Lainnya yang dipelihara / di	1 Unit	50.000.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				1.840.936.240	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				1.840.936.240	
B	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		Persentase capaian Kinerja Pendaftar, Pendaftaran dan Penetapan OP/SP/WP Pajak Daerah	100%	491.495.455	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		Persentase capaian Kinerja Pendaftar, Pendaftaran dan Penetapan OP/SP/WP Pajak Daerah	100%	491.495.455	
9	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		Jumlah Dokumen pendaftaran, pendaftaran dan penetapan OP/SP/WP Pajak daerah	28 Dokumen	491.495.455	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		Jumlah Dokumen pendaftaran, pendaftaran dan penetapan OP/SP/WP Pajak daerah	28 Dokumen	491.495.455	
1	Penyediaan sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak daerah	Bapenda	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	5 unit	180.100.305	Penyediaan sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak daerah	Bapenda	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	5 unit	180.100.305	
2	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Bapenda	Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak dan wajib pajak daerah	12 laporan	129.281.900	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Bapenda	Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak dan wajib pajak daerah	12 laporan	129.281.900	
3	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Bapenda	Jumlah laporan hasil pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah	2 Laporan	22.331.100	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Bapenda	Jumlah laporan hasil pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah	2 Laporan	22.331.100	
4	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan (BPHTB)	Bapenda	Jumlah objek pajak yang disesuaikan NJOPnya	241353 Cbyek Pajak	47.333.550	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan (BPHTB)	Bapenda	Jumlah objek pajak yang disesuaikan NJOPnya	241353 Obyek Pajak	47.333.550	
5	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Bapenda	Jumlah dokumen ketetapan pajak daerah	9 Dokumen	112.448.600	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Bapenda	Jumlah dokumen ketetapan pajak daerah	9 Dokumen	112.448.600	

6												
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		Jumlah Realisasi Pajak Daerah	100%	389.378.880	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Bapenda	Jumlah Realisasi Pajak Daerah	45.734.010.312	389.378.880		
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		Jumlah Dokumen Pembinaan, Pemeriksaan dan penagihan PAD	156 Dokumen	389.378.880	Jumlah Dokumen Pembinaan, Pemeriksaan dan penagihan PAD	Bapenda	Jumlah Dokumen Pembinaan, Pemeriksaan dan penagihan PAD	156 Dokumen	389.378.880		
1	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak daerah	Bapenda	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	6 Laporan	96.661.730	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak daerah	Bapenda	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	6 Laporan	96.661.730		
2	Pelayanan dan Konsultasi Pajak daerah	Bapenda	Jumlah layanan dan konsultasi pajak daerah	121 layanan	46.634.500	Pelayanan dan Konsultasi Pajak daerah	Bapenda	Jumlah layanan dan konsultasi pajak daerah	121 layanan	46.634.500		
3	Penagihan Pajak daerah	Bapenda	Jumlah hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah	2 Dokumen	134.118.050	Penagihan Pajak daerah	Bapenda	Jumlah hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah	2 Dokumen	134.118.050		
4	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Bapenda	Jumlah dokumen hasil penyelesaian keberatan pajak daerah	25 Dokumen	70.378.000	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Bapenda	Jumlah dokumen hasil penyelesaian keberatan pajak daerah	25 Dokumen	70.378.000		
5	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Bapenda	Jumlah dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah	2 Dokumen	41.586.600	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Bapenda	Jumlah dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah	2 Dokumen	41.586.600		
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		Persentase Capaian Kinerja Pembinaan dan Pengawasan Obyek Retribusi Daerah, Pajak Daerah dan Transfer antar daerah.	100%	960.061.905	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Bapenda	Persentase Capaian Kinerja Pembinaan dan Pengawasan Obyek Retribusi Daerah, Pajak Daerah dan Transfer antar daerah.	100%	960.061.905		
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		Jumlah Dokumen analisis kebijakan pengelolaan dan pengawasan Obyek Retribusi daerah, pajak daerah dan Transfer antar Daerah	23 Dokumen	960.061.905	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Bapenda	Jumlah Dokumen analisis kebijakan pengelolaan dan pengawasan Obyek Retribusi daerah, pajak daerah dan Transfer antar Daerah	23 Dokumen	960.061.905		
1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Bapenda	Jumlah Dokumen rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dokumen	38.836.215	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Bapenda	Jumlah Dokumen rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dokumen	38.836.215		
2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan kebijakan Pajak daerah	Bapenda	Jumlah dokumen hasil Analisa Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan kebijakan Pajak daerah	5 Dokumen	762.468.850	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan kebijakan Pajak daerah	Bapenda	Jumlah dokumen hasil Analisa Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan kebijakan Pajak daerah	5 Dokumen	762.468.850		
3	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Bapenda	Jumlah data pelaporan pajak daerah yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi	12 Dokumen	24.524.390	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Bapenda	Jumlah data pelaporan pajak daerah yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi	12 Dokumen	24.524.390		
4	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Bapenda	Jumlah Laporan hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Laporan	18.679.650	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Bapenda	Jumlah Laporan hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Laporan	18.679.650		

5	Elektronifikasi transaksi pemerintah daerah		jumlah laporan perkembangan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah	1 laporan	115.552.800	Elektronifikasi transaksi pemerintah daerah	Bapenda	jumlah laporan perkembangan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah	1 laporan	115.552.800	
---	---	--	---	-----------	-------------	---	---------	---	-----------	-------------	--

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

Dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan baik tingkat pusat maupun daerah, Bapenda Kabupaten Sumbawa sebagai Koordinator Bidang Pendapatan Daerah dalam hal ini pajak daerah dan retribusi daerah, Program dan kegiatan strategis dari tahun ketahun Bapenda Kabupaten Sumbawa berupaya dengan maksimal untuk melakukan tupoksinya dalam rangka tercapainya sasaran strategis yang telah ditetapkan. Selain itu, Bapenda Kabupaten Sumbawa tetap melakukan koordinasi dan sinergi dengan perangkat kerja penghasil retribusi daerah dalam rangka peningkatan kualitas pendapatan daerah agar sesuai dan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai target pendapatan daerah, Beberapa kegiatan yang perlu dilakukan oleh Bapenda Kabupaten Sumbawa antara lain:

1. Melakukan Koordinasi dalam hal Gerakan optimalisasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah perlu dimaksimalkan baik secara vertical dan horizontal dilingkungan pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa.
2. Pelayanan berbasis digitalisasi dalam memberikan pelayanan pajak daerah dan juga terhadap pelayanan retribusi daerah pada perangkat daerah penghasil yang lebih cepat, tepat, akurat, dan efisien perlu perbaikan system di aplikasi teknologi komunikasi yang dapat memproses dan memberikan pelayanan kepada wajib pajak dan wajib retribusi daerah secara lebih luas di wilayah Pemerintahan Kabupaten Sumbawa.
3. Peningkatan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan prinsip *good governance* disertai dengan peningkatan pelayanan public, Pengembangan system perencanaan pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur pemerintah, seiring dengan misi Kabupaten Sumbawa Sumbawa Bersih dan Melayani.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang diemban Bapenda Kabupaten Sumbawa maka harus dianalisis isi-isu yang akan dihadapi dan lebih responsive, kreatif dan inovatif dalam menanggapi perubahan-perubahan baik tingkat lokal, regional maupun nasional. Terkait dengan hal tersebut, perencanaan memperhatikan berupa identifikasi isu-isu dan permasalahan termasuk dalam hal pelayanan yang akan dihadapi pada waktu mendatang sehingga arah pelaksanaan pembangunan dapat menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu diperlukan perencanaan yang matang dan komprehensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan sebelumnya dan diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan meningkat menuju good governance dan clean government. Terkait dengan tugas dan fungsinya, maka Bapenda Kabupaten Sumbawa perlu meningkatkan dan menguatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintah dan kualitas pelayanan public.

Terkait dengan hal-hal tersebut di atas, isu-isu strategis yang muncul dan perlu dipertimbangkan oleh Bapenda Kabupaten Sumbawa yaitu sebagai berikut:

1. Rendahnya pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan daya saing daerah, yang ditandai dengan salah satunya adalah ketergantungan APBD terhadap Dana Transfer yang tinggi serta sumber pendanaan Non APBD yang kurang optimal;
2. Tax buoyancy;
3. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk kemandirian daerah;
4. Meningkatnya proporsi penerimaan pajak dan retribusi daerah sebesar 10%;
5. Perbaikan mekanisme pendataan potensi Pendapatan Daerah dan Peningkatkan koordinasi antara unit/badan pengelola Pajak dan Retribusi Daerah; dan
6. Pengelolaan dan Pemanfaatan sistem teknologi informasi pendapatan Daerah belum optimal

Dampak dari isu-isu strategis tersebut dapat mempengaruhi proses pembangunan daerah dan pelayanan bagi masyarakat melalui program-program strategis yang telah tertuang dalam Visi dan Misi Kepala Daerah. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk ditindak lanjuti dalam program dan kegiatan pengelolaan pendapatan daerah yang terdapat pada Bapenda Kabupaten Sumbawa dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, antara lain :

1. Mengoptimalkan sumber daya aparatur yang tersedia dengan meningkatkan kemampuan, keahlian dan kinerja melalui kegiatan-kegiatan BinteK, Diklat, Kursus atau sejenisnya sehingga dapat mengembangkan diri dalam pelayanan pajak daerah.
2. Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah penghasil dan pihak terkait dalam rangka mengatasi permasalahan pengelolaan pendapatan daerah.
3. Melakukan sinergitas program dan kegiatan dengan rencana pembangunan daerah.
4. Membuat kebijakan pencapaian terkait dengan perpajakan daerah maupun penerimaan lainnya serta melakukan sosialisasi berkelanjutan kepada masyarakat mengenai kesadaran membayar pajak daerah.
5. Masih terdapat potensi-potensi pendapatan pajak daerah yang belum tergali secara optimal sebagai upaya peningkatan pendapatan Asli daerah yang harus terus ditingkatkan.
6. Peningkatan pelayanan public melalui perbaikan system, prosedur dan tata kerja pemungutan pendapatan pajak daerah.

2.3.1 Permasalahan dan hambatan yang Dihadapi

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi Badan Pendapatan Kabupaten Sumbawa yang terkait dengan Pelayanan atau penyelenggaraan tugas dan fungsi telah disinkronisasikan dengan hasil identifikasi permasalahan Pendapatan di daerah dalam rancangan awal RPJMD

Kabupaten Sumbawa. Maka berbagai permasalahan pelayanan dan penyelenggaraan tugas Badan Pendapatan Daerah serta factor-faktor yang mempengaruhinya disajikan dengan memperhatikan hasil isian Tabel T-B.35 dalam Ranwal RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026, seperti dibawah ini:

TABEL 2.6

Pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Potensi PAD Rendah	Terbatasnya sumber Pendapatan Asli Daerah.	a. Adanya <i>closed list</i> (hanya dapat memungut jenis pajak dan retribusi daerah sebagaimana yang tercantum dalam UU dimaksud). b. Terbatasnya pertumbuhan sektor yang menjadi domain PAD, c. Tingkat <i>tax buoyancy</i> (elastisitas penerimaan pajak terhadap laju PDB) rendah
2	Kepatuhan rendah	1. Layanan pajak kurang Optimal	a. Belum baiknya system layanan b. Kinerja SDM rendah c. Kurang optimalnya system dan teknologi informasi. d. Database pajak tidak up to date.
		2. Kesadaran dan pemahaman wajib pajak rendah.	a. Efektivitas sosialisasi masih rendah. b. Belum efektifnya insentif dan sanksi bagi Wajib pajak/wajib retribusi.

Memperhatikan isi Tabel di atas , maka berikut ini adalah beberapa permasalahan dalam Pelayanan dan/atau penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah beserta factor-faktor yang mempengaruhinya:

TABEL 2.7

Faktor yang mempengaruhi Permasalahan

No	Permasalahan pelayanan PD/Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	Faktor yang mempengaruhi Permasalahan
1	Adanya <i>closed list</i> (hanya dapat memungut jenis pajak dan retribusi daerah sebagaimana yang tercantum dalam UU dimaksud).	Pembatasan jumlah pungutan pajak daerah dan retribusi daerah
2	Terbatasnya pertumbuhan sektor yang menjadi domain PAD,	Kurangnya koordinasi diintern satuan kerja maupun antar satuan kerja penghasil PAD
3	Tingkat <i>tax buoyancy</i> (elastisitas penerimaan pajak terhadap laju PDB) rendah	Rendahnya pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan daya saing daerah, yang ditandai dengan salah satunya adalah ketergantungan APBD terhadap Dana Transfer yang tinggi
4	Belum baiknya system layanan	Kurangnya pelayanan publik yang baik (<i>excellent service</i>), terpercaya dan transparan.
5	Kinerja SDM rendah	Kurangnya fungsi pengawasan melekat;

6	Kurang optimalnya system dan teknologi informasi.	Masih adanya beberapa kebutuhan data dan informasi yang belum terakomodasi ke dalam sistem (<i>software</i>), sehingga bisa menghambat proses pelaksanaan pengelolaan keuangan
7	Database pajak tidak up to date.	Alokasi anggaran pengembangan teknologi masih kurang
8	Efektivitas sosialisasi masih rendah.	Kurangnya sosialisasi terhadap wajib pajak dan retribusi pajak
9	Belum efektifnya insentif dan sanksi bagi Wajib pajak/wajib retribusi.	Belum adanya kebijakan khusus terkait pelaksanaan pemberian intensif dan sanksi bagi WP/WR.

2.3.2 Tantangan dan Peluang dalam Peningkatan Pelayanan

Dalam menganalisis kondisi lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi target dan capaian kinerja Badan Pendapatan daerah Kabupaten Sumbawa, dapat diketahui dengan melakukan analisis dengan metode SWOT (Strength Weakness, Opportunity ang Threat)

Lingkungan Internal

. Kekuatan (Strength)

. Adanya produk hukum berupa Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang ditindak lanjuti dengan penerbitan peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebagai dasar dalam pengelolaan pendapatan asli daerah, maka acuan dasar hukum yang digunakan oleh

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa bersumber dari aturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai petunjuk teknis yang mengatur tentang sistem administrasi dalam pengelolaan PAD maupun peraturan Daerah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah/Badan Legislatif Daerah sebagai dasar hukum penyelenggaraan pemungutan pajak/retribusi daerah;

- . Letak geografis Kabupaten Sumbawa yang cukup strategis di Propinsi Nusa Tenggara Barat, yang memiliki Objek wisata dan Komoditi hasil Bumi
- . Hal ini dapat memberikan efek terhadap peningkatan pendapatan daerah;

- . Aspek sumber daya manusia yang berkualitas dengan latar belakang sesuai dengan analisis jabatan, yang merupakan kekuatan dan dapat meningkatkan kinerja Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan pengelolaan pendapatan daerah maupun pelayanan terhadap masyarakat selaku wajib pajak;

- . Tersedianya anggaran/dana yang memadai yang bersumber dari APBD untuk penyelenggaraan program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa;

- . Tersedianya sistem informasi tentang pajak daerah sehingga optimalisasi pengelolaan data pendapatan daerah dapat terwujud. Selain itu gedung yang representative dan dilengkapi dengan peralatan memadai menjadikan kekuatan di bidang sarana/prasarana.

. Kelemahan (Weakness)

- .. Produk hukum yang berkaitan dengan optimalisasi pendapatan daerah, masih ada yang harus dilakukan revisi sesuai dengan kondisi yang ada serta masih banyak mekanisme pengelolaan pajak daerah yang perlu

ditetapkan dalam produk hukum baik berupa perda, perbup maupun keputusan Bupati sehingga dapat dijadikan acuan kerja dalam upaya peningkatan kinerja dan mengevaluasi kinerja.

- . Penerapan sanksi kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran aturan masih belum bisa diterapkan sehingga memberikan peluang untuk tidak mentaati aturan yang berlaku.

- . Masih terdapat potensi pendapatan yang cukup besar, namun belum optimal dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerah baik dari sisi intensifikasi maupun ekstensifikasi.

- . Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) di bidang pendapatan daerah yang belum memadai khususnya dalam hal pajak daerah , seperti belum dimilikinya PPNS, juru penilai, auditor, juru sita , dengan kondisi jabatan fungsional tersebut sangat di butuhkan.

Lingkungan Eksternal

. Peluang (Opportunity):

- . Dampak diberlakukannya UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien, Pemerintah memberikan kewenangan kepada pemerintah Daerah untuk memungut pajak dan retribusi dengan pemungutan melalui restrukturisasi jenis pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, penyederhanaan jenis retribusi, dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pemerintah memberikan kewenangan pemungutan Opsen pajak PKB, BBNKB dan Pajak MBLB. Pajak yang merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak Propinsi .Hal ini dapat meningkatkan kemandirian daerah tanpa menambah beban Wajib Pajak.karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai PAD.

. Dukungan dari Lembaga Eksekutif dan Lembaga Legislatif kepada Badan Pendapatan Daerah atas pengelolaan pendapatan Daerah di wilayah Kabupaten Sumbawa.

. Kondisi di Kabupaten Sumbawa cukup kondusif sehingga dapat memberikan rasa aman bagi investor untuk berinvestasi di wilayah Kabupaten Sumbawa sehingga diharapkan dapat meningkatkan potensi PAD.

. Kemajuan teknologi informasi dan pemanfaatan perangkat kertas yang menunjang efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada publik.

. Kerja sama yang telah terjalin baik dengan para stakeholder, seperti pemerintah daerah lainnya, pemerintah pusat dan propinsi, instansi terkait lainnya, pihak perbankan dan KPP Pratama, PLN, BUMD lainnya, Pengusahan asosiasi dan tokoh masyarakat sehingga pelayanan publik dapat lebih baik.

. Ancaman (Threat):

. Kesadaran masyarakat wajib Pajak dalam memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajak daerah dengan benar masih rendah.

. Penerapan Sanksi atas pelanggaran yang belum bisa diterapkan kepada wajib pajak, dijadikan celah oleh Wajib Pajak untuk menghindari pembayaran pajak.

. Kondisi pertumbuhan ekonomi yang menurun dapat mengakibatkan penurunan pembayaran pajak daerah.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Definisi RKPD berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 yaitu merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka

ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Sebagai pedoman rencana tahunan daerah, RKPD mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dengan alasan sebagai berikut:

1. RKPD merupakan dokumen yang menjadi penerjemahan dari visi, misi dan program kepala daerah yang ditetapkan dalam RPJMD kedalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah.
2. RKPD memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh perangkat daerah dalam Menyusun Renja Perangkat Daerah.
3. RKPD merupakan acuan Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD dan penentuan prioritas serta pagu anggaran yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam menyusun APBD.
4. RKPD merupakan salah satu instrument evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD ini dapat diketahui sampai sejauh mana tercapainya kinerja RPJMD sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah hingga tahun berkenan.

Dari isu-isu strategis dan permasalahan yang akan dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa, maka perlu kiranya membuat perencanaan untuk Langkah prioritas dalam penyelesaiannya. Guna mendukung tercapainya prioritas penyelesaian isu-isu strategis dan permasalahan tersebut maka perlu disusun program dan kegiatan untuk merealisasikannya. Penyusunan program dan kegiatan Bapenda Kabupaten Sumbawa Tahun 2026 mengacu pada program dan kegiatan tahun 2026 dan RKPD tahun 2026.

Perencanaan merupakan tahapan yang penting untuk dilalui dalam sebuah proses pembangunan karena dalam prakteknya pembangunan yang akan dilaksanakan akan menemui berbagai hambatan baik dari sisi pelaksana, masyarakat sebagai sasaran, maupun dari sisi di luar itu semua.

Untuk meminimalisasi dampak yang ditimbulkan oleh hambatan itulah maka perencanaan harus dilakukan sebagai sebuah tahap penting dalam proses pembangunan. Sudah menjadi kewajiban apabila kebutuhan akan selalu lebih besar dari sumber daya yang dimiliki.

Pada hakekatnya perencanaan pembangunan merupakan proses perumusan keputusan dari berbagai alternative, Berasal dari data dan informasi factual kemudian menjadi sumber untuk menentukan tujuan yang akan dicapai. Tujuan itu dalah meningkatnya kesejahteraan rakyat, yang hanya dapatb duicapai melauim tahap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang spesifik, terukur, dan tepat waktu. Dengan melihat dan membandingkan antara keinginan (rencana Pembangunan) dengan realita kemampuan yang dimiliki, maka dilakukan seleksi dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan atas program dan kegiatan Bapenda Kabupaten Sumbawa Tahun 2026, review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2026 berkaitan dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2026. Rumusan kebutuhan progran dan kegiatan dilengkapi dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target ndan besaran dana yang dibutuhkan.

Sebagai langkah sinkronisasi untuk mempercepat dan efektivitas pencapaian visi dan misi kepala daerah. Untuk lebih jelasnya *review* terhadap rancangan awal RKPD Badan Pendapatan daerahdisajikan dalam *Tabel 2.7* berikut:

TABEL 2.7
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA S/D TAHUN 2025
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja program (outcome)/Kegiatan(Output)/Sub kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD s/d 2025	Realisasi target kinerja hasil program dan kegiatan s/d tahun 2024	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2025			Target program dan kegiatan Renja PD tahun berjalan (2025)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun 2025	
					Target Renja PD tahun 2025	Realisasi Renja PD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=5+7+9	11=10/4
	Urusan Penunjang									
	Bidang Urusan Pemerintahan : Keuangan									
A	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai AKIP Bapenda								
a	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	45 dokumen	36 dokumen	12 dokumen	- dokumen	- dokumen	12 dokumen	45 dokumen	106,67 dokumen
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 dokumen	8 dokumen	2 dokumen	- dokumen	- dokumen	2 dokumen	10 dokumen	100,00 dokumen
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 dokumen	4 dokumen	1 dokumen	- dokumen	- dokumen	1 dokumen	5 dokumen	100,00 dokumen
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 dokumen	4 dokumen	1 dokumen	- dokumen	- dokumen	1 dokumen	5 dokumen	100,00 dokumen
4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 dokumen	4 dokumen	1 dokumen	- dokumen	- dokumen	1 dokumen	5 dokumen	100,00 dokumen
5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 dokumen	4 dokumen	1 dokumen	- dokumen	- dokumen	1 dokumen	5 dokumen	100,00 dokumen
6	Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi capaian kinerja SKPD	15 Laporan	12 Laporan	3 Laporan	- Laporan	- Laporan	3 Laporan	15 Laporan	100,00 Laporan
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	15 Laporan	12 Laporan	3 Laporan	- Laporan	- Laporan	3 Laporan	15 Laporan	100,00 Laporan
b	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah keluaran pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang direncanakan	80 dokumen	64 dokumen	16 dokumen	- dokumen	- dokumen	16 dokumen	80 dokumen	100,00 dokumen
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	275 Org/Bln	220 Org/Bln	55 Org/Bln	Org/Bln	- Org/Bln	55 Org/Bln	275 Org/Bln	100,00 Org/Bln
9	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	5 dokumen	4 dokumen	1 dokumen	dokumen	- dokumen	1 dokumen	5 dokumen	100,00 dokumen
10	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	5 dokumen	4 dokumen	1 dokumen	dokumen	- dokumen	1 dokumen	5 dokumen	100,00 dokumen

11	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	5 dokumen	4 dokumen	1 dokumen	dokumen	- dokumen	1 dokumen	5 dokumen	1.00,00 dokumen
12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	10 Laporan	8 Laporan	2 Laporan	Laporan	- Laporan	2 Laporan	10 Laporan	1.00,00 Laporan
13	Pengelolaan dan Penyajian bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan	5 dokumen	4 dokumen	1 dokumen	dokumen	- dokumen	1 dokumen	5 dokumen	1.00,00 dokumen
14	Koordinasi dan penyajian Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	40 Laporan	32 Laporan	8 Laporan	- Laporan	- Laporan	8 Laporan	40 Laporan	1.00,00 Laporan
15	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	5 dokumen	4 dokumen	1 dokumen	dokumen	- dokumen	1 dokumen	5 dokumen	1.00,00 dokumen
16	Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang disusun	15 dokumen	12 dokumen	3 dokumen	dokumen	- dokumen	3 dokumen	15 dokumen	1.00,00 dokumen
17	Penyusunan Perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD	5 dokumen	4 dokumen	1 dokumen	dokumen	- dokumen	1 dokumen	5 dokumen	1.00,00 dokumen
18	Rekonsiliasi Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	10 Laporan	8 Laporan	2 Laporan	- Laporan	- Laporan	2 Laporan	10 Laporan	1.00,00 Laporan
19	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	36 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	dokumen	- dokumen	12 dokumen	24 dokumen	66,67 dokumen
20	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	36 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	- dokumen	- dokumen	12 dokumen	24 dokumen	66,67 dokumen
21	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disusun	35 dokumen	21 dokumen	7 dokumen	- dokumen	- dokumen	7 dokumen	28 dokumen	80,00 dokumen
22	pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian	Jumlah dokumen pencatatan dan pengelolaan administrasi kepegawaian	35 dokumen	28 dokumen	7 dokumen	dokumen	- dokumen	7 dokumen	35 dokumen	1.00,00 dokumen
23	Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Jumlah dokumen Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	dokumen	- dokumen	1 dokumen	2 dokumen	1.00,00 dokumen
24	Administrasi Umum dan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disusun	380 dokumen	298 dokumen	72 dokumen	- dokumen	- dokumen	72 dokumen	370 dokumen	97,37 dokumen
25	Penyediaan komponen instalasi listrik /Penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 paket	4 paket	1 paket	paket	- paket	1 paket	5 paket	1.00,00 paket
26	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	20 paket	10 paket	10 paket	paket	- paket	10 paket	20 paket	1.00,00 paket
27	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	160 paket	128 paket	32 paket	- paket	- paket	32 paket	160 paket	1.00,00 paket

23	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	180 laporan	144 laporan	36 laporan	- laporan	- laporan	36 laporan	180 laporan	1.00,00 laporan
24	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	15 laporan	12 laporan	3 laporan	- laporan	- laporan	3 laporan	15 laporan	1.00,00 laporan
25	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disusun	265 dokumen	212 dokumen	53 dokumen	- dokumen	- dokumen	53 dokumen	265 dokumen	1.00,00 dokumen
26	Penyediaan jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	30 laporan	24 laporan	6 laporan	- laporan	- laporan	6 laporan	30 laporan	1.00,00 laporan
27	Penyediaan jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	20 laporan	16 laporan	4 laporan	- laporan	- laporan	4 laporan	20 laporan	1.00,00 laporan
28	Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	175 laporan	140 laporan	35 laporan	- laporan	- laporan	35 laporan	175 laporan	1.00,00 laporan
29	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	40 laporan	32 laporan	8 laporan	- laporan	- laporan	8 laporan	40 laporan	1.00,00 laporan
30	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	175 unit	141 unit	47 unit	- unit	- unit	47 unit	180 unit	1.07,43 unit
31	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	48 unit	48 unit	- unit	- unit	- unit	- unit	48 unit	1.00,00 unit
32	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	122 unit	120 unit	30 unit	- unit	- unit	30 unit	150 unit	1.22,95 unit
33	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan Prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / di rehabilitasi	5 unit	4 unit	1 unit	- unit	- unit	1 unit	5 unit	1.00,00 unit
34	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	411.102.466.207	283.040.522.026	104.703.921.182	-	-	104.703.921.182	387.744.443.208	94,32
35	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah dokumen pendataan, Pendaftaran dan Penetapan PAD	140 dokumen	84 dokumen	28 dokumen	- dokumen	- dokumen	28 dokumen	112 dokumen	80,00 dokumen
36		Jumlah Dokumen Pembinaan, Pemeriksaan dan Penagihan PAD	780 dokumen	468 dokumen	156 dokumen	- dokumen	- dokumen	156 dokumen	624 dokumen	80,00 dokumen
37		Jumlah Dokumen analisis kebijakan pengelolaan PAD dan Transfer antar Daerah	115 dokumen	69 dokumen	23 dokumen	- dokumen	- dokumen	23 dokumen	92 dokumen	80,00 dokumen
38	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen rencana Pengelolaan Pajak Daerah	10 dokumen	8 dokumen	2 dokumen	- dokumen	- dokumen	2 dokumen	10 dokumen	1.00,00 dokumen
39	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak daerah	Jumlah dokumen hasil Analisa Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan kebijakan Pajak daerah	25 dokumen	20 dokumen	5 dokumen	- dokumen	- dokumen	5 dokumen	25 dokumen	1.00,00 dokumen
40	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak daerah	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	30 laporan	30 laporan	6 laporan	- laporan	- laporan	6 laporan	30 laporan	1.20,00 laporan

35	Penyediaan sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak daerah	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	25 unit	20 unit	5 unit	unit	- unit	5 unit	25 unit	100,00 unit
36	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak dan wajib pajak daerah	60 Laporan	48 Laporan	12 Laporan	Laporan	- Laporan	12 Laporan	60 Laporan	100,00 Laporan
37	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah	10 Laporan	8 Laporan	2 Laporan	Laporan	- Laporan	2 Laporan	10 Laporan	100,00 Laporan
38	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah objek pajak yang disesuaikan NJO Pnya	1.206.765 obyek pajak	964.236 obyek pajak	241.353 obyek pajak	- obyek pajak	- obyek pajak	241.353 obyek pajak	1.205.589 obyek pajak	99,90 obyek pajak
39	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah dokumen ketetapan pajak daerah	45 dokumen	36 dokumen	9 dokumen	dokumen	- dokumen	9 dokumen	45 dokumen	100,00 dokumen
40	Pelayanan dan Konsultasi Pajak daerah	Jumlah layanan dan konsultasi pajak daerah	605 layanan	484 layanan	121 layanan	layanan	- layanan	121 layanan	605 layanan	100,00 layanan
41	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah data pelaporan pajak daerah yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi	60 dokumen	48 dokumen	12 dokumen	dokumen	- dokumen	12 dokumen	60 dokumen	100,00 dokumen
42	Penagihan Pajak daerah	Jumlah hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah	10 dokumen	8 dokumen	2 dokumen	dokumen	- dokumen	2 dokumen	10 dokumen	100,00 dokumen
43	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil penyelesaian keberatan pajak daerah	125 dokumen	100 dokumen	25 dokumen	dokumen	- dokumen	25 dokumen	125 dokumen	100,00 dokumen
44	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah	10 dokumen	8 dokumen	2 dokumen	dokumen	- dokumen	2 dokumen	10 dokumen	100,00 dokumen
45	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	20 Laporan	16 Laporan	4 Laporan	Laporan	- Laporan	4 Laporan	20 Laporan	100,00 Laporan
46	Elektronifikasi transaksi pemerintah daerah	Jumlah Laporan perkembangan Elektronifikasi transaksi pemerintah daerah	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Laporan	- Laporan	1 Laporan	2 Laporan	66,67 Laporan

2.5 . Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan pasal 4 Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 75 Tahun 2020 mempunyai tugas “ membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang di bidang keuangan sub urusan pendapatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah “

Sedangkan dalam melaksanakan tugas pokok Bapenda Kabupaten Sumbawa mempunyai Fungsi sebagaimana dalam pasal 5 yaitu :

- a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendapatan daerah;
- b. pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan di bidang pendapatan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pendapatan pajak daerah lainnya, serta pengendalian, pengembangan dan pelaporan;
- c. pelaksanaan administrasi/penatausahaan Badan;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pendapatan daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

BAB III

TUJUAN SASARAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Pembangunan nasional adalah tugas seluruh komponen bangsa, setiap rakyat Indonesia dapat mendukung pembangunan nasional untuk Indonesia Maju termasuk dengan membayar pajak sesuai ketentuan. Setiap rupiah yang dikumpulkan dari penerimaan perpajakan akan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Arah kebijakan pembangunan nasional dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional. Untuk itu perlu dibangun system yang terintegrasi dalam Menyusun perencanaan pembangunan Daerah di tingkat propinsi, yang selanjutnya didukung dan di pedomani oleh Kabupaten/Kota.

Dalam Rangka mewujudkan pembangunan nasional di seluruh sektor sangat dibutuhkan sumber pendanaan, salah satunya dari penerimaan perpajakan. Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, sasaran pembangunannya adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melaui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di baebagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. RPJMN Tahun 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai visi Indonesian maju tahun 2045.

Telaahan terhadap kebijakan nasional ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2019-2024. Dalam dokumen Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2019-2024 , sasaran yang ingin diwujudkan adalah Meningkatnya kemampuan fiskal dan kinerja keuangan daerah. Namun permasalahan pelayanan Badan Pendapatan Daerah adalah potensi dan wilayah Kabupaten Sumbawa yang sangat luas namun belum dioptimalkan dalam menggali sumber-sumber pendapatan dearah, baik dari sisi intensifikasi maupun ektensifikasi. Sehingga perlu dilakukan pemetaan potensi pajak daerah secara optimal dan percepatan dalam pengembangan aplikasi

pengelolaan pajak daerah. Perlu upaya terus menerus intensifikasi maupun ekstensifikasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Optimalisasi teknologi informasi yang ada serta adanya sarana dan prasarana yang memadai untuk pengelolaan pajak daerah.

Disamping itu, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dan kelembagaan/ketataalaksanaan yang belum memadai, belum optimalnya dan terbatasnya personil dalam penggalian sumber-sumber pendapatan dikarenakan kurang sarana kerja dan luasnya wilayah Kabupaten Sumbawa. Untuk mengatasi hal ini diperlukan pembinaan aparatur pemungut pajak melalui bintek.

Arah kebijakan Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Pengendalian dan pembinaan wajib pajak.
2. Kerja sama dengan lembaga sertifikasi terkait standar ISO.
3. Bimbingan Teknis Kompetensi layanan perpajakan.
4. Penetapan target pendapatan berdasarkan potensi.
5. Koordinasi dengan stakeholder terkait.
6. Pemetaan terhadap potensi pendapatan sesuai kewenangan yang di atur UU Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemerintah daerah.
7. Validasi data potensi penerimaan pendapatan asli daerah.
8. Pemanfaatan Teknologi Informasi.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan merupakan target kualitatif organisasi. Sehingga pencapaian target ini dapat merupakan ukuran kinerja factor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Tujuan sifatnya lebih kongkrit dari pada misi dan mengarah kepada suatu titik terang pencapaian hasil. Dengan adanya pernyataan tujuan, maka akan jelas bagi organisasi mengenai arah yang akana dituju dalam rangkan mempertahankan eksistensi di masa mendatang, Tujuan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa sesuai Rencana Strategis yang ditetapkan yaitu

“Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Pendapatan asli daerah” dimana keberhasilan pencapaian tujuan diukur dalam kurun waktu lima tahunan.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi dalam waktu tahunan/periodic yang dinyatakan secara kuantitatif, sehingga dapat diukur. Sasaran yang hendak dicapai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis 2021-2026 yaitu

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan (Formulasi pengukuran, tipe penghitungan, sumber data)
Meningkatnya jumlah pendapatan Asli daerah	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2023 tentang PDRD

Adapun sasaran dari pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa pada Tahun Anggaran 2026 adalah optimalisasis Sumber-sumber pendapatan pajak daerah .

Untuk menunjang keberhasilan dari tujuan dan sasaran diatas maka diperlukan program dan kegiatan sebagai operasional pelayanan dan pendapatan daerah khususnya pajak daerah . Adapun program pembangunan daerah sesuai dengan RPJMD yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi Bapenda Kabupaten Sumbawa adalah Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan konsentrasi pada penggalian potensi pajak daerah dan pemberian pelayanan kepada masyarakat, yang ditunjang dengan 1 (satu) kegiatan dan 15 sub kegiatan yaitu :

a	Program pengelolaan pendapatan daerah	1. Perencanaan Pengelolaan Pajak daerah
		2. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
		3.Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah

		4. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
		5. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak daerah
		6. Pengelolaan Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak daerah
		7. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
		8. Penetapan Wajib Pajak Daerah
		9. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
		10. Penelitian dan Verifikasi Data Laporan Pajak daerah
		11. Penagihan Pajak Daerah
		12. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
		13. Pengendalian , Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
		14. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak daerah dan Retribusi Daerah
		15. Elektronifikasi transaksi pemerintah daerah

3.3 Program dan Kegiatan

Untuk mewujudkan tujuan serta sasaran pembangunan Kabupaten Sumbawa , sesuai Analisa kebutuhan untuk Tahun 2025 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa melaksanakan 2 Program , 9 Kegiatan serta 43 sub kegiatan sesuai dengan Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 sebagaimana tabel berikut.

TABEL 3.1
Rencana Pendanaan Indikatif Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa
Tahun 2026

Urusan Bidang/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(output)	Rencana Tahun 2026		
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif
1	2	3	4	5
URUSAN WAJIB				
Bidang Urusan Pemerintah Daerah fungsi Penunjang Keuangan				14.266.274.612,10
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai AKIP Bapenda	Bapenda		12.425.338.372,10
Perencanaan ,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun.		12 DOKUMEN	120.421.950,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 dokumen	10.985.590,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 dokumen	7.622.450,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 dokumen	6.268.900,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 dokumen	9.386.410,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD		1 dokumen	4.393.400,00
Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi capaian kinerja SKPD		3 laporan	32.310.300,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan evaluasi kinerja perangkat daerah		3 laporan	49.454.900,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Keluaran Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan		16 dokumen	10.736.724.774,60
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN		55 org/bln	10.696.520.874,60
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN		1 dokumen	5.846.500,00
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD		1 dokumen	15.636.500,00
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD		1 dokumen	3.698.200,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD		2 laporan	4.371.400,00
Pengelolaan dan Penyiapan bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan		1 dokumen	2.461.800,00
Koordinasi dan penyiapan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		8 laporan	3.602.500,00
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran		1 dokumen	4.587.000,00
Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang disusun		3 dokumen	5.431.140,00
Penyusunan Perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	Tersedianya RKBMD SKPD		1 dokumen	3.771.240,00
Rekonsiliasi Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		2 laporan	1.659.900,00
Administrasi pendapatan daerah kewangan perangkat daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah		12 dokumen	33.275.000,00
Pelaporan pengelolaan retribusi daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah		12 laporan	33.275.000,00
Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disusun		7 dokumen	5.898.200,00
pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian		7 dokumen	3.973.200,00
Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai		1 dokumen	1.925.000,00
Administrasi Umum dan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disusun		82 Dokumen	531.574.532,50
Penyediaan komponen instalasi listrik /Penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 paket	6.048.762,50
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		10 paket	265.198.670,00
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu		32 laporan	39.986.100,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		36 laporan	217.343.500,00
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD		3 dokumen	2.997.500,00

Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disusun	53 dokumen	778.646.000,00
Penyediaan jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	6 laporan	15.210.800,00
Penyediaan jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	4 laporan	81.554.000,00
Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	35 laporan	57.079.000,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	8 laporan	624.602.200,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	47 unit	213.366.775,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	30 unit	163.366.775,00
Pemeliharaan /Rehabilitasi sarana dan Prasarana gedung kantor atau bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan Prasarana gedung kantor atau bangunan Lainnya yang dipelihara / di rehabilitasi	1 unit	50.000.000,00
Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase capaian Kinerja Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan OP/SP/WP Pajak Daerah		1.840.936.240,00
Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen pendataan, pendaftaran dan penetapan PAD	28 dokumen	491.495.455,00
Penyediaan sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak daerah	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	5 unit	180.100.305,00
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak dan wajib pajak daerah	12 laporan	129.281.900,00
Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah	2 laporan	22.331.100,00
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah objek pajak yang disesuaikan NJOPnya	241353 Obyek pajak	47.333.550,00
Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah dokumen penetapan pajak daerah	9 dokumen	112.448.600,00
Elektronifikasi transaksi pemerintah daerah	Jumlah laporan perkembangan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah	1 laporan	115.552.800,00
Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Pembinaan, Pemeriksaan dan Penagihan PAD	156 dokumen	383.378.880,00
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak daerah	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	6 laporan	96.661.730,00
Pelayanan dan Konsultasi Pajak daerah	Jumlah layanan dan konsultasi pajak daerah	121 layanan	46.634.500,00
Penagihan Pajak daerah	Jumlah hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah	2 dokumen	134.118.050,00
Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil penyelesaian keberatan pajak daerah	25 dokumen	70.378.000,00
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah	2 dokumen	41.586.600,00
Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase capaian kinerja pembinaan dan pengawasan obyek retribusi, pajak dan transfer antar daerah		
Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen analisis kebijakan pengelolaan dan pengawasan Obyek Retribusi daerah, pajak daerah dan Transfer antar Daerah	23 dokumen	960.061.905,00
Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 dokumen	38.836.215,00
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan kebijakan Pajak daerah	Jumlah dokumen hasil Analisa Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan kebijakan Pajak daerah	5 dokumen	762.468.850,00
Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah data pelaporan pajak daerah yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi	12 dokumen	24.524.390,00
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 laporan	18.679.650,00
Elektronifikasi transaksi pemerintah daerah	Jumlah laporan perkembangan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah	1 laporan	115.552.800,00

TABEL 3.2
RENCANA PENDAPATAN ASLI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

Kode Rekening	Uraian	T.A. 2026
		(Rp)
5.02.0.00.0.00.03.000	Badan Pendapatan Daerah	212.638.105.973
0		
4	PENDAPATAN DAERAH	212.638.105.973
4,1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	109.939.117.241
4,1,01	Pajak Daerah	85.831.460.762
4.1.01.06	Pajak Hotel	3.058.571.250
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	2.954.385.000
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	2.954.385.000
	:: Pajak Hotel	000
	::: Pajak Hotel/ Jasa Perhotelan	000
	Pajak Hotel	2.954.385.000
4.1.01.06.03	Pajak Losmen	104.186.250
4.1.01.06.03.0001	Pajak Losmen	104.186.250
	:: Pajak Losmen	000
	::: Pajak Losmen	000
	Pajak Losmen	104.186.250
4.1.01.07	Pajak Restoran	4.410.000.000
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	1.137.780.000
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	1.137.780.000
	:: Pajak Restoran dan Sejenisnya	000
	::: Restoran dan Sejenisnya	000
	Pajak Restoran dan Sejenisnya	1.137.780.000
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	3.272.220.000
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	3.272.220.000
	:: Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	000
	::: Rumah Makan dan Sejenisnya	000
	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	3.272.220.000
4.1.01.08	Pajak Hiburan	525.000.000
4.1.01.08.02	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	525.000.000
4.1.01.08.02.0001	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	525.000.000
	:: Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	000
	::: Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	000
	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	525.000.000
4.1.01.09	Pajak Reklame	1.386.063.000
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	1.386.063.000
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	1.386.063.000
	:: Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	000
	::: Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	000
	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	1.386.063.000
4.1.01.11	Pajak Parkir	520.980.863
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	520.980.863
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	520.980.863
	:: Pajak Parkir	000
	::: Pajak Parkir	000

	Pajak Parkir	520.980.863
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	404.011.125
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	404.011.125
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	404.011.125
	:: Pajak Air Tanah	000
	::: Pajak Air Tanah	000
	Pajak Air Tanah	404.011.125
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	44.100.000
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	44.100.000
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	44.100.000
	:: Pajak Sarang Burung Walet	000
	::: Pajak Sarang Burung Walet	000
	Pajak Sarang Burung Walet	44.100.000
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	4.672.500.000
4.1.01.14.23	Pajak Pasir dan Kerikil	3.012.859.500
4.1.01.14.23.0001	Pajak Pasir dan Kerikil	3.012.859.500
	:: Pajak Pasir dan Kerikil	000
	::: Pajak Pasir dan Kerikil	000
	Pajak Pasir dan Kerikil	3.012.859.500
4.1.01.14.30	Pajak Tanah Liat	375.716.250
4.1.01.14.30.0001	Pajak Tanah Liat	375.716.250
	:: Pajak Tanah Liat	000
	::: Pajak Tanah Liat	000
	Pajak Tanah Liat	375.716.250
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	1.283.924.250
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	1.283.924.250
	:: Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	000
	::: Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	000
	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	1.283.924.250
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	7.035.000.000
4.1.01.15.01	PBBP2	7.035.000.000
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	7.035.000.000
	:: PBBP2	000
	::: Perdesaan	000
	PBBP2	4.520.547.000
	::: Perkotaan	000
	PBBP2	2.514.453.000
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	8.925.000.000
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	7.601.475.000
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	7.601.475.000
	:: BPHTB-Pemindahan Hak	000
	::: BPHTB-Pemindahan Hak	000
	BPHTB-Pemindahan Hak	7.601.475.000
4.1.01.16.02	BPHTB-Pemberian Hak Baru	1.323.525.000
4.1.01.16.02.0001	BPHTB-Pemberian Hak Baru	1.323.525.000
	:: BPHTB-Pemberian Hak Baru	000
	::: BPHTB-Pemberian Hak Baru	000
	BPHTB-Pemberian Hak Baru	1.323.525.000
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	20.580.000.000
4.1.01.19.02	PBJT-Tenaga Listrik	20.580.000.000

4.1.01.19.02.0001	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	20.580.000.000
	:: PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	000
	::: PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	000
	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	20.580.000.000
4.1.01.20	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	19.843.754.858
4.1.01.20.01	Opsen PKB	19.843.754.858
4.1.01.20.01.0001	Opsen PKB	19.843.754.858
	:: Opsen PKB	000
	::: Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	000
	Opsen PKB	19.843.754.858
4.1.01.21	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	14.426.479.667
4.1.01.21.01	Opsen BBNKB	14.426.479.667
4.1.01.21.01.0001	Opsen BBNKB	14.426.479.667
	:: Opsen BBNKB	000
	::: Opsen BBNKB	000
	Opsen BBNKB	14.426.479.667
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16.714.110.706
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	16.714.110.706
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	16.714.110.706
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	16.714.110.706
	:: Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	000
	::: Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	000
	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	16.714.110.706
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	7.393.545.773
4.1.04.05	Jasa Giro	2.504.127.464
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	2.504.127.464
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	2.504.127.464
	:: Jasa Giro pada Kas Daerah	000
	::: Jasa Giro pada Kas Daerah	000
	Jasa Giro pada Kas Daerah	2.504.127.464
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	4.889.418.309
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	4.889.418.309
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	4.889.418.309
	:: Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	000
	::: Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	000
	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	4.889.418.309
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	67.208.988.732
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	67.208.988.732
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	67.208.988.732
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	67.208.988.732
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	000

	:: Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	000
	::: Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	000
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	000
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	000
	:: Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	000
	::: Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	000
	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	000
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	34.720.310.948
	:: Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	000
	::: Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	000
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	34.720.310.948
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	66.313.038
	:: Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	000
	::: Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	000
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	66.313.038
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	32.422.364.746
	:: Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	000
	::: Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	000
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	32.422.364.746
4,3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	35.490.000.000
4,3,03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	35.490.000.000
4.3.03.03	Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara	35.490.000.000
4.3.03.03.01	Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara	35.490.000.000
4.3.03.03.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Lainnya dalam Provinsi	35.490.000.000
	:: Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Lainnya dalam Provinsi	000
	::: Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Lainnya dalam Provinsi	000
	Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Lainnya dalam Provinsi	35.490.000.000
	Jumlah	212.638.105.973
	Jumlah	212.638.105.973

BAB.IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

Setelah ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) maka disusunlah Renja Bapenda Kabupaten Sumbawa tahun 2026. Renja disusun untuk memudahkan mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja Bapenda Kabupaten Sumbawa pada tahun 2025. Renja ini dibuat sebagai implementasi dari tugas pokok dan fungsi Bapenda Kabupaten Sumbawa dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah sebagai mana yang tertuang dalam Renstra Bapenda Kabupaten Sumbawa tahun 2021-2026.

Pendanaan program dan kegiatan didasarkan pada program dan kegiatan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Merealisasikannya perencanaan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2026 dan perkiraan tahun 2026, maka ditetapkan anggaran untuk mendanai program dan kegiatan Bapenda Kabupaten Sumbawa berdasarkan indikator kinerja dan sasaran kereja yangb dijabarkan dalam pencapaian Renstra Bapenda Kabupaten Sumbawa tahun 2021-2026 berdasrkan pagu indikatif. Untuk kelancaran pelaksanaan seluruh program dan kegiatan pada Bapenda Kabupaten Sumbawa harus disusun pulan rencana pendanaan indikatif yang disusun berdasarkan kebutuhan penggunaan biaya sebagai mana dapat diliohat pada tabelkikut ini :

Sebagai ilustrasi untuk lebih jelasnya berikut disajikan program dan kegiatan Badan Pendapatan daerahPada periode Tahun Anggaran 2026 pada Tabel 4.1 :

TABEL 4.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kota	Nilai AKIP Bapenda	Bapenda	A	12.392.063.372			A	13.631.269.709
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun.	Bapenda	12 dokumen	120.421.950	APBD		12 dokumen	132.464.145
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bapenda	2 Dokumen	10.985.590	APBD		2 Dokumen	12.084.149
5.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Bapenda	1 Dokumen	7.622.450	APBD		1 Dokumen	8.384.695
5.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Bapenda	1 Dokumen	6.268.900	APBD		1 Dokumen	6.895.790
5.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Bapenda	1 Dokumen	9.386.410	APBD		1 Dokumen	10.325.051
5.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Bapenda	1 Dokumen	4.393.400	APBD		1 Dokumen	4.832.740
5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi capaian kinerja SKPD	Bapenda	3 Laporan	32.310.300	APBD		3 Laporan	35.541.330
5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Bapenda	3 Laporan	49.454.900	APBD		3 Laporan	54.400.390
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Keluaran Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang direncanakan	Bapenda	16 Dokumen	10.736.724.775	APBD		16 Dokumen	11.810.397.252
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Bapenda	55 org/bln	10.696.520.875	APBD		55 org/bln	11.766.172.962

5	02	.01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Bapenda	1 Dokumen	5.846.500	APBD		1 Dokumen	6.431.150
5	02	.01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Bapenda	1 Dokumen	15.636.500	APBD		1 Dokumen	17.200.150
5	02	.01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Bapenda	1 Dokumen	3.698.200	APBD		1 Dokumen	4.068.020
5	02	.01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Bapenda	1 Dokumen	4.371.400	APBD		1 Dokumen	4.808.540
5	02	.01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan	Bapenda	2 Dokumen	2.461.800	APBD		2 Dokumen	2.707.980
5	02	.01	2.02	07	Koordinasi dan penyiapan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Bapenda	8 Laporan	3.602.500	APBD		8 Laporan	3.962.750
5	02	.01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Bapenda	1 Dokumen	4.587.000	APBD		1 Dokumen	5.045.700
5	02	.01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang di Susun	Bapenda	4 Dokumen	5.431.140	APBD		4 Dokumen	5.974.254
5	02	.01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD	Bapenda	1 Dokumen	3.771.240	APBD		1 Dokumen	4.148.364
5	02	.01	2.03	05	Rekonsiliasi Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Bapenda	2 laporan	1.659.900	APBD		2 laporan	1.825.890
5	02	.01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi daerah	Bapenda	12 Laporan	33.275.000	APBD		12 Laporan	33.275.000
5	02	.01	2.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi daerah	Bapenda	12 Laporan	33.275.000	APBD		12 Laporan	33.275.000
5	02	.01	2.05		Administrasi kepegawalan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah yang disusun	Bapenda	7 Dokumen	5.898.200	APBD		7 Dokumen	6.488.020
5	02	.01	2.05	03	pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawalan	Jumlah dokumen pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawalan	Bapenda	7 Dokumen	3.973.200	APBD		7 Dokumen	4.370.520
5	02	.01	2.05	05	Monitoring , Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring , Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Bapenda	1Dokumen	1.925.000	APBD		1Dokumen	2.117.500
5	02	.01	2.06		Administrasi Umum dan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disusun	Bapenda	82 Dokumen	531.574.533	APBD		82 Dokumen	584.731.986
5	02	.01	2.06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik /Penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Bapenda	1 Paket	6.048.763	APBD		1 Paket	6.653.639
5	02	.01	2.06	02	Penyediaan peralatan dan peralatan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Bapenda	10 paket	265.198.670			10 paket	291.718.537

5	02	.01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Baperda	32 Kali	39.986.100	APBD		32 Kali	43.984.710
5	02	.01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Baperda	36 Laporan	217.343.500	APBD		36 Laporan	239.077.850
5	02	.01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Baperda	3 Dokumen	2.997.500	APBD		3 Dokumen	3.297.250
5	02	.01	2.08		Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disusun	Bapenda	53 Dokumen	778.646.000	APBD		53 Dokumen	856.510.600
5	02	.01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Baperda	6 Laporan	15.210.800	APBD		6 Laporan	16.731.880
5	02	.01	2.08	02	Penyediaan jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	Baperda	4 Laporan	8.554.000	APBD		4 Laporan	89.709.400
5	02	.01	2.08	03	Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Baperda	35 Laporan	57.079.000	APBD		35 Laporan	62.786.900
5	02	.01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Baperda	8 Laporan	624.802.200	APBD		8 Laporan	687.282.420
5	02	.01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disusun	Bapenda	47 Unit	213.366.775	APBD		47 Unit	234.703.453
5	02	.01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Baperda	30 Unit	163.366.775	APBD		30 Unit	179.703.453
5	02	.01		10	Pemeliharaan /Rehabilitasi sarana dan Prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan Prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / di rehabilitasi	Baperda	1 Unit	50.000.000	APBD		1 Unit	55.000.000
5	02	.04			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase capaian Kinerja Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan OP/SP/WP Pajak Daerah	Bapenda	100%	4.308.712.210	APBD		100%	4.721.573.401
5	02	.01	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen pendataan, pendaftaran dan penetapan OP/SP/WP Pajak daerah	Bapenda	28 Dokumen	4.308.712.210	APBD		28 Dokumen	4.721.573.401
5	02	.01	2.01	01	Penyediaan sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak daerah	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	Baperda	5 unit	180.100.305	APBD		5 unit	180.100.305
5	02	.01	2.01	02	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak dan wajib pajak daerah	Baperda	12 laporan	129.281.900	APBD		12 laporan	142.210.090
5	02	.01	2.01	03	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah	Baperda	2 Laporan	22.331.100	APBD		2 Laporan	24.564.210

5	02	.01	2.01	04	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah objek pajak yang disesuaikan NJOPnya	Bapenda	241353 Obyek Pajak	47.333.550	APBD		241353 Obyek Pajak	52.066.905
5	02	.01	2.01	05	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah dokumen ketetapan pajak daerah	Bapenda	9 Dokumen	112.448.600	APBD		9 Dokumen	123.693.463

5	02	.04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Jumlah Realisasi Pajak daerah	Bapenda	44.503.581.250	389.378.880			46.734.010.312	428.316.768
5	02	.01	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	<i>Jumlah Dokumen Pembinaan, Pemeriksaan dan penagihan PAD</i>	Bapenda	156 Dokumen	389.378.880	APBD		156 Dokumen	428.316.768
5	02	.01	2.01	06	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak daerah	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	Bapenda	6 Laporan	96.661.730	APBD		6 Laporan	106.327.903
5	02	.01	2.01	07	Pelayanan dan Konsultasi Pajak daerah	Jumlah layanan dan konsultasi pajak daerah	Bapenda	121 layanan	46.634.500	APBD		121 layanan	51.297.950
5	02	.01	2.01	08	Penagihan Pajak daerah	Jumlah hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah	Bapenda	2 Dokumen	134.118.050	APBD		2 Dokumen	147.529.855
5	02	.01	2.01	09	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil penyelesaian keberatan pajak daerah	Bapenda	25 Dokumen	70.378.000	APBD		25 Dokumen	77.415.800
5	02	.01	2.01	10	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah	Bapenda	2 Dokumen	41.586.600	APBD		2 Dokumen	45.745.260
5	02	.04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Capaian Kinerja Pembinaan dan Pengawasan Obyek Retribusi Daerah, Pajak Daerah dan Transfer antar daerah.	Bapenda	100%	844.509.105			100%	928.960.016
5	02	.01	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	<i>Jumlah Dokumen analisis kebijakan pengelolaan dan pengawasan Obyek Retribusi daerah, pajak daerah dan Transfer antar Daerah</i>	Bapenda	23 Dokumen	844.509.105	APBD		23 Dokumen	928.960.016
5	02	.01	2.01	11	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Bapenda	2 Dokumen	38.836.215	APBD		2 Dokumen	42.719.837
5	02	.01	2.01	12	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak daerah	Jumlah dokumen hasil Analisa Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan kebijakan Pajak daerah	Bapenda	5 Dokumen	762.468.850	APBD		5 Dokumen	838.715.735
5	02	.01	2.01	13	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah data pelaporan pajak daerah yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi	Bapenda	12 Dokumen	24.524.390	APBD		12 Dokumen	26.976.829
5	02	.01	2.01	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Bapenda	4 Laporan	18.679.650	APBD		4 Laporan	20.547.615

5	02	.01	2.01	15	Elektronifikasi transaksi pemerintah daerah	jumlah laporan perkembangan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah	Bapenda	1 laporan	115.552.800			1 laporan	127.108.080
---	----	-----	------	----	---	---	---------	-----------	-------------	--	--	-----------	-------------

BAB IV

PENUTUP

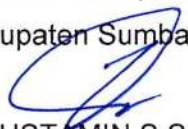
Renja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 di lingkup Badan Pendapatan Daerah, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2020 sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sumbawa tahun 2016-2021.

Dalam rangka mencapai target, isi dokumen Renja Badan Pendapatan Daerah tahun 2025 diharapkan mampu diaplikasikan oleh seluruh unsur internal Badan Pendapatan Daerah, diikuti dengan upaya-upaya pencapaian yang efektif dan efisien sehingga dapat mendorong tercapainya seluruh target pembangunan tahun 2025 sesuai dengan yang dicita-citakan.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan perencanaan pembangunan dan statistik yang diemban oleh Badan Pendapatan Daerah sebagai salah satu SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa.

Semoga Renja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Sumbawa tahun 2025. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

Sumbawa Besar, 12 Januari 2025
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Sumbawa



AGUS MUSTAMIN, S.Sos, M.Si
NIP. 19700823 199211 1 001